

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN LUAS WILAYAH
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-
2016)**

Oleh :

Ivan Lamido

Pembimbing : Vince Ratnawati dan Susilatri

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : lamido_ivan@yahoo.com

*The Influence of Local Revenue and General Allocation Fund to Capital Expenditure
with Area as Moderating Variable*

(Empirical Study in Regency/City of Province North Sumatera period 2014-2016)

ABSTRACT

This study aims to know the influences of Local Revenue and General Allocation Funds to Capital Expenditure with area as variable moderating. The population of this study is all the city/regency in Province North Sumatera period 2014-2016. All of the population are sample. The Method of analysis uses multiple linear regression. The results of testing that has been done. Partial regression test (t test) showed that the Local Revenue has effect to capital expenditure with $P < 0,05$ ($P = 0,000$). General Allocation Funds has no effect to capital expenditure with $P > 0,05$ ($P = 0,448$). The result of this study also show that area do not moderate the effect of local revenue and general allocation fund to capital expenditure.

Keywords : local revenue, general allocation funds, capital expenditure, area

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari 2001 telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Didalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu perubahan bentuk pemerintahan sentralisasi menjadi struktur terdesentralisasi, pemerintah berharap pembangunan secara optimal dan merata di daerah dapat tercapai.

Undang – undang otonomi daerah tersebut memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur kepentingan dan rumah tangganya

sendiri, dengan diberikan kewenangan dalam menggali potensi – potensi alam daerahnya, menggali sumber keuangan dan pendapatan asli daerah (PAD). (Kusnandar dan Siswanto, 2012:1).

Dalam meningkatkan pembangunan yang merata dan optimal di daerah melalui asas desentralisasi, pemerintah daerah membutuhkan dasar pengelolaan keuangan daerah yaitu APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi belanja modal yang nantinya diharapkan dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Untuk membiayai belanja modal tersebut pemerintah daerah menggunakan berbagai sumber dana. Salah satu sumber dana yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini dapat berupa retribusi daerah, pendapatan pajak daerah dan pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Fakta dan data yang ada di daerah biasanya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan yang cukup besar. Melalui Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah berusaha untuk menutupi besarnya belanja daerah melalui Dana Alokasi Umum. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 72.981,23 km² yang menempatkan provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi dengan luas wilayah ke delapan terluas di Indonesia. Dengan wilayah yang begitu luas, pemerintah daerah perlu bekerja dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan pembangunan yang optimal dan merata di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah data luas wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara (km²)

NO	Daerah	Luas Wilayah (km ²)
1	Kab. Asahan	3.702,21
2	Kab. Dairi	1.927,80
3	Kab. Deli Serdang	2.241,68
4	Kab. Tanah Karo	2.127,00
5	Kab. Labuhan Batu	2.156,02
6	Kab. Langkat	6.262,00
7	Kab. Mandailing Natal	6.134,00
8	Kab. Nias	1.842,51
9	Kab. Simalungun	4.386,60
10	Kab. Tapanuli Selatan	6.030,47
11	Kab. Tapanuli Tengah	2.188,00
12	Kab. Tapanuli Utara	3.791,64
13	Kab. Toba Samosir	2.328,89
14	Kota Binjai	59,19
15	Kota Medan	265,10
16	Kota Pematang Siantar	55,66
17	Kota Sibolga	41,31
18	Kota Tanjung Balai	107,83
19	Kota Tebing Tinggi	31,00
20	Kota Padang Sidempuan	114,66
21	Kab. Pakpak Barat	1.218,30
22	Kab. Nias Selatan	1.825,20
23	Kab. Humbang Hasundutan	2.335,33
24	Kab. Serdang Bedagai	1.900,22
25	Kab. Samosir	2.069,05
26	Kab. Batu Bara	922,20
27	Kab. Padang Lawas	3.892,74
28	Kab. Padang Lawas Utara	3.918,05
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	3.596
30	Kab. Labuhanbatu Utara	3.570,98
31	Kab. Nias Utara	1.202,78
32	Kab. Nias Barat	473,73
33	Kota Gunung Sitoli	280,78

Sumber : Wikipedia

Penggunaan belanja modal oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara hanya sebesar 22,97% atau sebesar Rp 2,068 triliun dari total APBD. Nilai ini tentu sangat minim dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 72.981,23 km². Gubernur Sumatera Utara mengingatkan supaya belanja modal untuk kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih besar. Mengingat

bahwa belanja modal seharusnya digunakan sebagai salah satu dana untuk pembangunan infrastruktur. Seperti halnya dalam kunjungan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu yang mengeluhkan masih terdapat banyaknya jalan yang rusak dikota Medan, padahal sudah jelas bahwa jalan merupakan salah satu sarana dan infrastruktur yang dibangun menggunakan Alokasi Belanja Modal. Pernyataan Gubernur Sumatera Utara tersebut dikutip dari harian Waspada (2016)

Terdapat beberapa hasil penelitian yang telah menguji hubungan PAD dan DAU terhadap belanja modal. Purnama (2014) melakukan penelitian pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tentang “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA, dan Luas wilayah terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal serta Situngkir (2009) meneliti tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara”. Hasil penelitian secara parsial menyatakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Wahyuningsih (2013) meneliti tentang “Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Kusnandar dan Siswanto (2012) meneliti tentang “Pengaruh DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal”. Hasil penelitian ini menyatakan secara parsial bahwa PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh

terhadap Belanja Modal. Maka melalui penelitian ini saya ingin menguji kembali hasil penelitian sebelumnya apakah faktor Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Luas Wilayah sebagai variabel moderating. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal? 2)Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal? 3)Apakah Luas Wilayah dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal? 4)Apakah Luas Wilayah dapat memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal? Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai 1)pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. 2)pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi belanja Modal. 3)Untuk menguji apakah luas wilayah dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. 4)Untuk menguji apakah luas wilayah dapat memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal.

TELAAH PUSTAKA

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, pengertian belanja modal adalah sejumlah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu: 1)Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan

untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuat sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 5) Belanja modal fisik lainnya merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

$$BM = BT + BPM + BGB + BJI + BATL$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

BT: Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan dan Mesin

BGB : Belanja Gedung dan Bangunan

BJI : Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

BATL : Belanja Aset Tetap Lainnya

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Menurut Prasetyo (2014) Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Oktrinatmaja (2011) dan Febrina dan Praptoyo (2015) dalam penelitiannya menyatakan PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut apakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Oktriniatmaja, 2011). Oktora & Pontoh (2013) dan Mayasari (2016) dalam penelitiannya menyatakan DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Luas Wilayah dalam Memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar dan Siswanto, 2009). Dapat disimpulkan bahwa Luas Wilayah yang lebih besar memerlukan

pendapatan yang besar juga untuk meningkatkan belanja modal yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Hasnur (2016) penelitiannya menyatakan bahwa luas wilayah dapat memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

H₃: Luas Wilayah Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Luas Wilayah dalam Memoderasi Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal

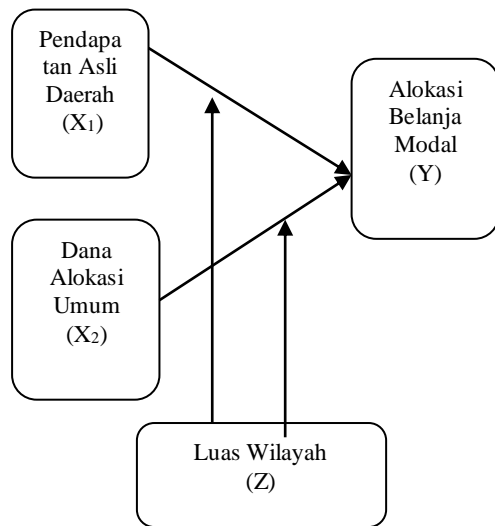
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasan undang-undang nomor 33 tahun 2004 salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Penelitian yang dilakukan (Kusnandar dan Dodik, 2012) menyatakan luas wilayah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri. Maka besarnya Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten/kota untuk Alokasi Belanja Modal dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya adalah luas wilayah. Hasnur (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa luas wilayah dapat memoderasi dana alokasi umum terhadap belanja modal.

H₄: Luas Wilayah Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal

Model Penelitian

Berikut model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 1



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang diperoleh melalui sumber data sekunder. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data PAD, DAU, Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2016, serta data luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh peneliti melalui Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2014-2016 yaitu PAD, DAU, dan Alokasi Belanja Modal berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, selanjutnya data pada tabel Luas Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh wikipedia.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016 dan tabel data Luas Wilayah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut: 1)Menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran secara berturut-turut per 31 Desember dari tahun anggaran 2014-2016. 2)Memiliki data Luas Wilayah. Dengan mengacu pada kriteria penentuan sampel di atas, maka terpilihlah 33 kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Alokasi Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pengukuran Alokasi Belanja Modal dalam penelitian ini mengikuti Adiputra dkk (2015) yaitu menggunakan indikator besarnya alokasi belanja modal yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (X₁)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; lain-lain PAD yang sah. Pengukuran PAD dalam penelitian ini mengikuti Adiputra dkk (2015) yaitu menggunakan indikator besarnya jumlah realisasi PAD yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil

kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum (X₂)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep Fiscal Gap, di mana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (fiscal needs) dengan potensi Daerah (fiscal capacity). Pengukuran DAU dalam penelitian ini mengikuti Adiputra dkk (2015) yaitu menggunakan indikator besarnya jumlah DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Luas Wilayah (Z)

Provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 72.981,23 km² yang menempatkan provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi dengan luas wilayah ke delapan terluas di Indonesia. Dengan wilayah yang begitu luas, pemerintah daerah perlu bekerja dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan pembangunan yang optimal dan merata di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Pengukuran Luas Wilayah dalam penelitian ini mengikuti Hasnur (2016) yaitu menggunakan indikator besarnya luas wilayah .

Metode Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Linear Regresssion Analysis*) versi 21.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012:206). Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mean (rata-rata), Minimum, Maximim dan Standar Deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak valid dan dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas menggunakan grafik dapat menyesatkan karena secara grafik kelihatan normal, tetapi secara statistik dapat sebaliknya. Oleh itu, untuk memperkuat uji normalitas dapat dilakukan dengan statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Bila Probabilitas > 0,05 maka populasi berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji *Run Test* sebagai bagian dari statistik non

parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari: pertama, nilai *tolerance* dan lawannya. Kedua, *Variance Inflation Factor* (VIF). Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Metode yang digunakan untuk melihat adanya multikolinieritas dengan melihat angka *Variance Inflation Factor* (VIF). Yaitu jika $0,1 < VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan cara meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan

keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis penelitian ini ingin membuktikan apakah PAD dan DAU masing-masing berpengaruh secara langsung terhadap terhadap alokasi belanja modal. Uji t dilakukan untuk melihat atau menguji apakah tiap-tiap variabel bebas (independen) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (dependen), dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel (Ghozali,2013:98). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah jika Nilai Probabilitas Signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa Variabel Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen dan jika Nilai Probabilitas Signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa Variabel Independen berpengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen.

b. Uji Nilai Selisih Mutlak (*absolute difference value*)

Uji hipotesis moderating dilakukan dengan menggunakan uji nilai selisih mutlak dengan alasan model ini mampu mengatasi multikolinearitas yang umumnya terjadi sangat tinggi apabila menggunakan uji interaksi dan model ini memasukkan variabel efek utama dalam analisis regresi, sedangkan uji residual hanya memasukkan efek interaksi saja. Uji nilai selisih mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya.

Jika selisih nilai mutlak diantara kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut :

Persamaan I:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z_1 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

$\beta_1 X_1$ = Pendapatan Asli Daerah

$\beta_2 X_2$ = Dana Alokasi Umum

$\beta_3 Z_1$ = Luas Wilayah

e = error term

Persamaan II:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z_1 + \beta_4 (X_1 Z_1) + \beta_5 (X_2 Z_1) + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

Z = Luas Wilayah

$\beta_1 X_3$ = Luas Wilayah

$X_1 Z_1$ = Nilai Interaksi antara PAD dan Luas Wilayah

$X_2 Z_1$ = Nilai Interaksi antara DAU dan Luas Wilayah

e = error term

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	99	99.388,00	956.334,00	249.108,323	174.691,280
PAD	99	10,000,00	1.535.309,00	116.633,727	264.269,799
DAU	99	279.675,00	1.611.940,00	611.284,505	280.760,405
LUAS	99	31,000,00	6.262,000	2.212,088	1.815,104
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data Olahan (2018)

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan hasil statistik deskriptif masing-masing 9 instrument dari sebanyak 99 data yang diteliti. Untuk instrumen Belanja Modal (BM) dalam jutaan rupiah memiliki nilai minimum Rp. 99.388,00 dan nilai maksimum Rp. 956.334,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 249.108,323 dan standar deviasi Rp. 174.691,280.

Untuk instrumen variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jutaan rupiah memiliki nilai minimum Rp. 10.000,00 dan nilai maksimum Rp. 1.535.309,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 116.633,727 dan standar deviasi Rp. 264.269,799.

Untuk instrumen variabel Dana Alokasi Khusus (DAU) dalam jutaan rupiah memiliki nilai minimum Rp. 279.675,00 dan nilai maksimum Rp. 1.611.940,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 611.284,505 dan standar deviasi Rp. 280.760,405

Untuk instrumen Luas Wilayah dalam Km² memiliki nilai minimum 31,00 dan nilai maksimum 6.262,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 2.212,088 dan standar deviasi 1.815,104.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini, pengujian normalitas data dapat dilihat dari *normal probability plot*. Berdasarkan grafik normal p-plot terlihat data menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Jadi, dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu dapat juga dilihat apakah model regresi memenuhi asumsi

normalitas. Berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov* diatas diketahui nilai *P value* (*Asymp.Sig*) sebesar $0,065 > 0,05$. Artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Dari hasil perhitungan analisis data, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerance* $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

c. Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser dalam aplikasi SPSS. Dari hasil analisis pada tabel di atas dapat diambil kesimpulan 1)Nilai signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah 0,909 2)Nilai signifikan variabel Dana Alokasi Umum 0,606 3)Nilai signifikan variabel Luas Wilayah 0,535. Hal ini menandakan seluruh variabel PAD, DAU, dan luas wilayah merupakan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pada tabel erlihat bahwa nilai Durbin-Watson model adalah 1,974. Dari tabel Durbin Watson dengan $\alpha = 5\%$; $n = 99$; $(k - 1)$ didapatkan nilai dU 1,735. Dari nilai tersebut diketahui bahwa $4-dU = 4-1,735 = 2,265$. dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai Drubin Watson 1,974 lebih besar dari 1,735 dan lebih kecil dari 2,265. Artinya tidak terjadi masalah autokorelasi pada model yang dibangun.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis 1 dan 2

Pengujian hipotesis 1 dan 2 dilakukan dengan analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Hasil Persamaan Regresi Linear
Berganda I

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	228,434	54,142		4,219	,000
PAD	,479	,080	,711	5,975	,000
DAU	,081	,107	,095	,763	,448
LUAS WILAYAH	1,382	,493	,223	2,804	,006

Sumber : Data Olahan (2018)

Hasil Pengujian Hipotesis I

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variable PAD sebesar 5,975 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha/2 = 99 - 3 - 1: 0,05/2 = 95 : 0,025 = \pm 1,985$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (5,975) > t_{tabel} (1,985)$ dan $Sig (0,000) < 0,05$. Oleh karena itu dapat dikatakan H_0 1 ditolak dan H_a 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap BM. Pemerintah Daerah harus mampu mengelola dan mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Hasil Pengujian Hipotesis II

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel DAU sebesar 0,763 dengan signifikansi 0,448 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha/2 = 99 - 3 - 1: 0,05/2 = 95 : 0,025 = \pm 1,985$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (0,763) < t_{tabel} (1,985)$ dan $Sig (0,448) > 0,05$. Oleh karena itu dapat dikatakan H_0 1 diterima dan H_a 1 ditolak. Hal ini

menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap BM. DAU sering disebut bantuan tak bersyarat (unconditional grants) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan terdapat kemungkinan bahwa DAU lebih diarahkan untuk belanja selain belanja modal yaitu belanja operasi dan belanja tak terduga.

Hasil Pengujian Hipotesis 3 dan 4

Pengujian hipotesis ke 3 dan 4 dilakukan dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA) yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Hasil Persamaan Regresi Linear
Berganda II

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	355,467	150,646		2,360	,020
PAD	,611	,156	,906	3,922	,000
DAU	-,148	,262	-,173	-,564	,574
1 LUAS	1,001	2,536	-,162	-,395	,694
PADxLUAS	-,003	,004	-,171	-,667	,506
DAUxLUAS	,004	,004	,650	1,018	,311

Sumber : Data Olahan (2018)

Hasil Pengujian Hipotesis III

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk PADxLuas sebesar 0,667 dengan signifikansi 0,506 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1$: $\alpha/2 = 99 - 5 - 1$: $0,05/2 = 93$: $0,025 = \pm 1,986$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan.

Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (0,667) < t_{tabel} (1,986)$ dan $Sig (0,506) > 0,05$. Oleh karena itu dapat dikatakan H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa Luas tidak memoderasi hubungan antara PAD dengan BM. Pemerintah dalam hal pembangunan sarana publik dan infrastruktur harus menimbang skala prioritas dimana kebutuhan pembangunan sarana dan infrastruktur tidak tergantung akan besar dan luasnya wilayah suatu daerah melainkan kebutuhan mendesak dari suatu daerah agar pembangunan sarana dan infrastruktur tersebut dilaksanakan karena menyangkut kebutuhan orang banyak.

Hasil Pengujian Hipotesis IV

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk DAUxLuas sebesar 1,018 dengan signifikansi 0,311 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1$: $\alpha/2 = 99 - 5 - 1$: $0,05/2 = 93$: $0,025 = \pm 1,986$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa $t_{hitung} (1,018) < t_{tabel} (1,986)$ dan $Sig (0,311) > 0,05$. Oleh karena itu dapat dikatakan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Luas Wilayah tidak memoderasi hubungan antara DAU dengan BM. Luas Wilayah tidak memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal dapat disebabkan kebutuhan Belanja Modal pada suatu daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Luas Wilayah tidak memengaruhi celah fiskal pada suatu daerah. Celah fiskal timbul akibat selisih antara kebutuhan fiskal kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal kabupaten/kota. Celah Fiskal ini kemudian ditutupi oleh Dana Alokasi Umum. Luas wilayah dalam hal ini tidak mempengaruhi besarnya kebutuhan fiskal kabupaten/kota.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R Square sebesar 0,648. Artinya adalah bahwa sumbangan

pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat adalah sebesar 64,8% Sedangkan sisanya 35,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Simpulan Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. 3) Luas Wilayah tidak memoderasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. 4) Luas Wilayah tidak memoderasi pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu menjadi bahan revisi penelitian selanjutnya adalah: 1) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. 2) Penelitian ini menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah dapat menjelaskan variabel Belanja Modal sebesar 64,8%. Sedangkan sisanya 35,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, I Made Wardana dkk. 2015. "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening". *Simposium Nasional Akuntansi 18*

Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015.

Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah". *Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok Universitas Mataram 24-27 September 2014.*

Azwardi dan Abukosim. 2007. "Pengelolaan Keuangan Pedesaan dalam mendorong pembangunan wilayah pedesaan: Suatu Tinjauan Teoriti". *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5 (2). Pp. 127-134. ISSN 1829-5843.*

Febriana, Imas Sherli dan Sugeng Praptoyo. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No 9.*

Harahap, Riva Ubar. 2011. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 11 No. 1/Maret 2011.*

Hasnur, A. Firman. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah sebagai variabel moderating pada pemerintah kabupaten/kota di

- Sulawesi Selatan*.”Skripsi Universitas Negeri Alauddin Makassar.
- Hayati, Anisa Nur. 2015. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Variabel Intervening*”. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Juliani. 2016. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau*”. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau.
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*”. Jurnal Universitas Indonesia Jakarta.
- Maryadi. 2014. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah. Terhadap Belanja Modal*”.
- Oktriniatmaja, Rini. 2011. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*”. Tesis Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sugiyono. 2012. “*Metode Penelitian Bisnis*”. Bandung: Alfabeta
- Susanti, Susi dan Heru Fahlevi. 2016. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 183-191.
- Suwarjeni, V. W. 2014. “*SPSS untuk Penelitian*”. Jakarta: Baru Press.
- Wahyu, I Putu Adita dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. “*Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SILPA pada IPM*”. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.3.
- Williantara Gede Ferdi dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia*”.Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 16.3.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan nomor
101/PMK.02/2011 tentang
klasifikasi anggaran